

# UPAYA PENYELAMATAN KARESIDENAN LAMPUNG DARI AGRESI MILITER BELANDA II TAHUN 1949

**Lian Pratama, Iskandar Syah, M. Basri**

FKIP Unila Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947 faximile (0721) 704 624

*e-mail:* Pratama\_safitri@yahoo.com

Hp. 08532158097

Based on the formulation, so that this study aimed for rescue efforts Lampung Residency of military aggression II 1949 in politics and military. This study used the historical method with the literature's and the documentation's data collection techniques, while the data analysis is the qualitative data analysis. The result showed that the rescue efforts Residency Lampung by the public and government Lampung, this is show in the field of political and military to make emergency rule on the move and guerrilla for the new dutch attack. In Lampung second military aggression (*Clash II*) new start Januari 1, 1949, Netherlands entrance to the bay Lampung through Kalianda towards the port Panjang.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penyelamatan Karesidenan Lampung dari Ageresi Militer Belanda II tahun 1949 dalam bidang politik dan militer. Metode yang digunakan adalah metode historis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi, sedangkan untuk menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya upaya penyelamatan Karesidenan Lampung oleh masyarakat dan pemerintahan Lampung, ini ditunjukkan pada bidang politik dan militer yaitu dengan membuat pemerintahan darurat yang berpindah-pindah dan gerilya untuk menghadapi serangan Belanda. Di Lampung agresi militer kedua (*Clash II*) baru dimulai tanggal 1 Januari 1949, Belanda masuk ke Teluk Lampung melalui Kalianda menuju Pelabuhan Panjang.

**Kata kunci:** agresi militer II, belanda, karesidenan lampung

## PENDAHULUAN

Pada awal Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 Lampung masih merupakan sebuah karesidenan dari Provinsi Sumatera tahun pertama Kementerian Dalam Negeri dari 12 kemerdekaan pemerintah, memutuskan bahwa seluruh wilayah Indonesia dibagi dalam delapan Provinsi dan setiap provinsi dibagi lagi menjadi beberapa karesidenan, kabupaten, kotapraja, dan kawedanan (Supangat, Dewan Harian Angk'45:10).

Selama periode perang kemerdekaan (1945-1949) banyak peraturan-peraturan pusat mengenai administrasi pemerintahan daerah yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perkembangan administrasi pemerintahan selanjutnya menjadi Provinsi Sumatera dengan sepuluh karesidenan yaitu: Karesidenan Aceh,

Karesidenan Sumatera Timur, Karesidenan Tapanuli, Karesidenan Sumatera Barat, Karesidenan Riau, Karesidenan Jambi, Karesidenan Bengkulu, Karesidenan Lampung dan Karesidenan Bangka-Belitung (Nugroho Sutanto, 1975:244). Memasuki zaman kemerdekaan dua hari setelah proklamasi PPKI menetapkan keputusan yaitu tentang pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi delapan Provinsi yaitu: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Setiap provinsi membawahi beberapa Karesidenan dan setiap Karesidenan dibagi lagi menjadi beberapa Kabupaten/Kotapraja (Supangat, Dewan Harian angk' 45,1994:105).

Peristiwa tersebut terjadi pada bulan September 1946 yang bertujuan untuk mengambil kekuasaan pemerintahan

Karesidenan Lampung dari Residen Mr. Abbas. Diawali pada tanggal 9 September 1946 mereka menempelkan famlet-famlet di Kota Tanjungkarang dan Teluk Betung mereka menuntut agar 15 orang pejabat yang duduk dalam pemerintahan Karesidenan Lampung pada waktu itu diberhentikan karena nilai tidak cukup, tidak adil dalam menjalankan pemerintahan.

Usaha pendaulatan tersebut berhasil, kemudian Residen Lampung dijabat oleh Dr. Barel Munir, akan tetapi ia mengundurkan diri tanggal 29 November 1947 dan sebagai gantinya Rukadi yang menjabat sebagai Residen Lampung. Pada tanggal 19 Desember 1948 Pukul 06.00 WIB agresi militer kedua di lancarkan Belanda, dengan pasukan lintas udara, serangan langsung di tujukan ke Ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta.

Lapangan terbang Maguwo dapat dikuasai Belanda, dan selanjutnya seluruh kota Yogyakarta. Angkatan perang yang telah membagi wilayah pertahanan Republik menjadi dua komando, yaitu Jawa dan Sumatera, siap melaksanakan rencana di bidang pemerintahan tersebut. Di Lampung Agresi militer kedua (Clash II) baru dimulai tanggal 1 Januari 1949, Belanda masuk ke Teluk Lampung melalui Kalianda menuju Pelabuhan Panjang. Kira-kira Pukul 05.00 pagi, kapal perang Belanda mulai menembaki Pelabuhan Panjang. Tetapi karena perlawanan dari pihak tentara kita di Panjang, baru setelah kira-kira jam 06.00 mereka dapat mendarat di Pantai luar Pelabuhan Panjang dan di Pantai sekitar Gunung Kunyit Telukbetung.

Ibukota Karesidenan akhirnya dapat diduduki oleh pasukan Belanda pada hari itu juga. Karena peristiwa itu, maka pemerintahan Karesidenan Lampung, Letnan Kolonel Syamaun Gaharu dengan anggota-anggota stafnya beserta pejabat-pejabat sipil Karesidenan Lampung pada tanggal 1 Januari 1949 sudah berada di Gedung Tataan, sedangkan rombongan keluarga militer dan sipil yang mengungsi sudah berada di Pringsewu. Dalam pada itu front utara dengan bataliyon mobilnya yang dipimpin oleh Mayor Nurdin pada tanggal 1 Januari 1949 sore hari sudah berada di Kotabumi (Ali Imron, dkk, 1994:28)

Daerah Lampung kemudian segera dijadikan daerah karesidenan yang dikepalai oleh seorang Residen Militer bernama Letnan Kol. Kurita (Dewan Harian Daerah, 1994:104). Dalam lembaga pemerintahan dibawah tingkat karesidenan, kepengurusannya diserahkan kepada orang Indonesia. Dalam tindakan ini Jepang tidak mengawasi secara langsung melainkan hanya bertindak sebagai pengawas saja. Semenjak proklamasi 17 Agustus 1945 maka terbukalah harapan bagi bangsa Indonesia umumnya, bahwa dalam alam kemerdekaan bisa dilaksanakan pembangunan yang membawa peningkatan taraf hidup disegala bidang. Setelah ada kabar dari Jakarta, khususnya PPKI memerintahkan kepada pemerintah kepemerintah daerah untuk mempersiapkan kemerdekaan yang seutuhnya.

Pemerintah pusat menghimbau kepada daerah-daerah untuk melakukan perbuatan yang dapat memperkuat persatuan perjuangan dalam bidang pemerintahan dan kekuatan militer yang berguna untuk melawan serangan dari luar, seperti yang kita ketahui walaupun kita sudah merdeka gangguan masih saja datang yang dapat mengancam kemerdekaan Indonesia. Dalam usaha pemindah kekuasaan dari tangan Jepang kepemerintah Indonesia, diadakan perundingan antara Residen Jepang Khobayashi dengan Mr. Abbas (yang kemudian menjadi Residen pertama yang ditunjuk langsung dari pusat) dengan didampingi oleh St. Rahim Pasaman yang telah berjanji akan menyerahkan kekuasaan pemerintahan Karesidenan Lampung secara damai, pengembalian kekuasaan pemerintahan karesidenan kemudian disusul dengan pengembalian instansi-instansi lain. Instansi-instansi tersebut adalah: Kantor Telepon Tanjung Karang Kantor Pos dan Telegram, stasiun kereta api, Perusahaan Gas dan Listrik, Pelabuhan Panjang dan Gudang Agen Pabrik es, Gedung Peralatan Kaygun (Supangat, Dewan Harian Ang' 45, 1994:136).

Sebagai Residen pertama Karesidenan Lampung Mr. Abbas dan wakilnya St. Rasim Pasaman, mempunyai tugas-tugas penting diantaranya: Pengambilan kekuasaan pemerintah dari tangan Jepang ke tangan Pemerintah Republik Indonesia, pembentukan

organisasi perjuangan dikalangan pemuda bekas *Heiho*, *Gyugun* serta organisasi politik, usaha untuk mendapatkan senjata dengan jalan melucuti senjata Jepang, pembentukan PKR (Penjaga Keamanan Rakyat) dibawah kepemimpinan Pangerah Emir Moh. Nur, yang anggotanya para mantan *Gyugun*, *Heiho*, *sjeneindan*, *Keibodan* dan tokoh-tokoh pemuda militan. Di Lampung pada pertengahan bulan Desember 1945 para perwira *Gyugun* Lampung yang memimpin PKR, pelopor dan organisasi kelaskaran mengadakan musyawarah untuk membentuk Resimen III dengan komandan yang terpilih adalah Iwan Supardi, mendirikan sekolah latihan calon perwira di Langkapura. Pada bulan Februari 1946 tentara Jepang menduduki daerah Lampung telah selesai seluruhnya meninggalkan Lampung menuju Palembang, namun walaupun Republik Indonesia telah merdeka, akan tetapi sistem pemerintahan yang dipakai pada zaman Jepang masih tetap diteruskan.

Kekacauan pemerintahan yang pernah terjadi di Lampung berasal dari sebuah Resolusi yang dilakukan oleh sebuah badan yang menamakan dirinya Panitia Perbaikan Masyarakat (PBM). Berikut nama-nama presidium yang tergabung dalam organisasi Panitia Perbaikan Masyarakat, bertindak sebagai ketua umum Abdulillah Sani, Bagian Keamanan Bek Ali, Bagian Penerangan Zuned Azhari, Bagian Perhubungan Ibrahim Itam, bagian Keuangan Kgs. Akhmadi, Bagian perancang Ibrahim Husin, bagian Penyidik Zaenal Abidin Keneror (Supangat, Dewan Harian Angk 45, 1994: 185-186).

Pada tanggal 19 Desember 1948 Pukul 06.00 WIB agresi militer kedua dilancarkan Belanda dengan pasukan lintas udara serangan langsung ditujukan ke Ibukota Republik Indonesia Yogyakarta. Lapangan terbang Maguwo dapat dikuasai Belanda dan selanjutnya seluruh kota Yogyakarta. Angkatan perang yang telah membagi wilayah pertahanan Republik menjadi dua komando, yaitu Jawa dan Sumatera siap melaksanakan rencana dibidang pemerintahan tersebut. Di Lampung Agresi militer kedua (Clash II) baru dimulai tanggal 1 Januari 1949 Belanda masuk ke Teluk Lampung melalui Kalianda menuju Pelabuhan Panjang, kira-

kira Pukul 05.00 pagi kapal perang Balanda mulai menembaki Pelabuhan Panjang. tetapi karena perlawanan dari pihak tentara kita di Panjang baru setelah kira-kira Pukul 06.00 WIB mereka dapat mendarat di Pantai luar Pelabuhan Panjang dan di Pantai sekitar Gunung Kunyit Telukbetung.

Ibukota karesidenan akhirnya dapat diduduki oleh pasukan Belanda pada hari itu juga, karena peristiwa itu maka pemerintahan Karesidenan Lampung Letnan Kolonel Syamaun Gaharu dengan anggota-anggota stafnya beserta pejabat-pejabat sipil Karesidenan Lampung pada tanggal 1 Januari 1949 sudah berada di Gedong Tataan, sedangkan rombongan keluarga militer dan sipil yang mengungsi sudah berada di Pringsewu. Dalam pada itu front utara dengan bataliyon mobilnya yang dipimpin oleh Mayor Nurdin pada tanggal 1 Januari 1949 sore hari sudah berada di Kotabumi (Ali Imron, dkk, 1994:28).

#### **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan faktor penting bagi seorang peneliti untuk memecahkan masalah yang dihadapi, karena selain menjelaskan garis-garis yang cermat juga menentukan hasil suatu penelitian. Menurut Husin Sayuti "Metode adalah cara kerja yang dapat memahami objek menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan" (Sayuti,1980:32), sedangkan menurut Winarno Suracmad metode adalah suatu cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik serta alat tertentu (Suracmad,1978:121). Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian historis karena penelitian ini mengambil objek dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Metode historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-pennggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu ,terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan kejadian atau keadaan masa lalu, untuk kemudian hasilnya juga dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan

masa yang akan datang (Hadari Nawawi, 1993 : 78-79).

Variabel adalah suatu konsep yang diberi nilai, sedangkan variabel dalam suatu penelitian merupakan hal yang paling utama karena variabel merupakan suatu konsep dalam suatu penelitian. Variabel adalah himpunan sejumlah gejala yang memiliki beberapa aspek atau unsur di dalamnya yang bersumber dari kondisi objek penelitian, tetapi dapat pula berada di luar dan berpengaruh pada objek penelitian (Nugroho Notosusanto, 1984: 55). Berdasarkan pengertian variabel tersebut, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal dengan fokus penelitian pada upaya penyelamatan Karesidenan Lampung dari Agresi Militer Belanda II tahun 1949.

Pengumpulan data selalu memiliki hubungan dengan dengan masalah yang hendak dipecahkan atau diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik, hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan agar lebih akurat yakni dengan menggunakan teknik kepustakaan dan dokumentasi. Teknik kepustakaan adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah (Joko Subagyo 1997:109).

Teknik dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan lain sebagainya (Arikunto, 1989: 188). Langkah yang harus ditempuh setelah pengumpulan data yaitu analisis data. Analisis data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. "Analisis data yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data" (Moeleong, 2004: 280). Dalam hal ini, analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengingat data tersebut berupa fenomena-fenomena yang terjadi yang dikumpulkan dalam bentuk laporan dari

karangan para sejarawan sehingga memerlukan pemikiran yang tepat dalam menyelesaikan masalah penelitian tersebut. Teknik analisa data kualitatif lebih mewujudkan kata-kata dari pada deretan angka yang menjadi bahan utama bagi ilmu-ilmu sosial. Data kualitatif merupakan sumber deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum kemerdekaan, daerah Lampung merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, karena itu sejarah perjuangan, pergerakan yang terjadi di daerah Karesidenan Lampung berhubungan erat dengan sejarah perjuangan di Provinsi Sumatera Selatan. Karesidenan Lampung di dalam hubungannya dengan sejarah nasional Indonesia dikenal sejak nama Sriwijaya. Berita-berita Tionghoa menyebut-nyebut tentang adanya Kerajaan Tulang Bawang pada abad ke VII Masehi, tetapi masalah Tulang Bawang masih bersifat problematik, sebab istilah Tulang Bawang sendiri adalah transkripsi dari berita Tionghoa yang menyebut nama To Lang Apo Hwang, yang ditranskripsikan To Lampung = orang Lampung (Dewan Harian Daerah Angkatan 45 , 1994:41).

Lampung yang letaknya berhadapan dengan Banten, tentu saja menjadi perhatian Belanda pula karena Lampung merupakan daerah penghasil rempah-rempah, terutama lada yang sangat terkenal di Eropa. Untuk itu daerah Karesidenan Lampung menjadi incaran pemerintahan Belanda hanya saja Belanda pada saat itu tidak dapat mengadakan hubungan langsung dengan Karesidenan Lampung karena Karesidenan Lampung sendiri pada saat itu berada dibawah kekuasaan Banten (Utomo, Joko DJ, 2004:3). Pada awal abad ke 19 perlawanan terjadi di daerah Abung (Kotabumi) di bawah pimpinan Pangeran Indra Kusuma. Perlawanan selanjutnya dilakukan penguasa Karesidenan Lampung yang diakui pada masa Deandles yaitu Raden Intan I.

Setelah Belanda berhasil menguasai Karesidenan Lampung maka kekuasaan

Belanda di Karesidenan Lampung dipegang oleh seorang opsir yang mempunyai kekuasaan sipil dan militer yang disebut *gaseheber*. Setelah tahun 1929 Karesidenan Lampung diperintah oleh seorang asisten residen dengan Terbanggi sebagai ibukotanya. Ketika kekuasaan Hindia Belanda mulai mantap kemudian Karesidenan Lampung sendiri mulai dilakukan pembagian wilayah administrasi atas Karesidenan Lampung yang terdiri dari enam *afdeling* dengan ibukotanya berkedudukan di Teluk Betung. Kabar kekalahan Jepang segera sampai pula ke Lampung dan menyebabkan mulai diadakannya persiapan seperlunya untuk dapat berbuat sesuatu sesuai dari petunjuk pusat. Selanjutnya oleh Amir Hasan, kepala penerangan Karesidenan Lampung dengan melalui berita radio bahwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia telah diumumkan kepada dunia internasional pada tanggal 12 Agustus 1945, selanjutnya kedatangan Mr. A. Abbas dari Jakarta memperkuat berita proklamasi tersebut.

Pada tanggal 22 Februari 1949 kurang lebih jam 03.00 malam Belanda masuk dari arah Bedeng 26 B, menuju Bedeng 45 (Markas TNI). Kebetulan markas tersebut dalam keadaan kosong, lalu rumah yang digunakan sebagai Markas TNI dibakar, sejumlah 3 rumah habis dimakan api. Rumah tersebut adalah milik pribadi bapak Citrowikarto (Lurah Bedeng 45).

Belanda kembali dari tempat tersebut menuju Bedeng 43 membakar 1 rumah lumbung milik bapak Suprayit dan membakar 1 rumah lagi milik bapak Sastro, barang-barang yang dibawa: 18 ekor itik, 40 ekor ayam, 1 buah bak mandi milik bapak Suprayit, korban jiwa tidak ada. Pada tanggal 15 Maret 1949 kurang lebih jam 03.30 Markas TNI di Bedeng 47 diserang oleh Belanda sehingga pihak TNI mundur.

Mr. A. Abbas sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dari Lampung. Bersama Mr. Teuku Mohammad Hasan dan Dr. M. Amir, pada tanggal 23 Agustus 1945 mereka berangkat dari Jakarta dengan kapal terbang ke Palembang. Mereka ini lah yang membawa berita resmi mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Tindakan Mr.A. Abbas yang ditunjuk sebagai residen pertama untuk Lampung setelah proklamasi, segera membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Lampung, yang selanjutnya disusul dengan dibentuknya komite-komite nasional ditingkat kawedanan dan kecamatan. Komite Nasional Indonesia Daerah Lampung, yang anggota-anggotanya sebagai besar adalah bekas anggota *syusangikai* (semacam penasehat pemerintah atau dewan perwakilan rakyat daerah buatan pemerintah tentara pendudukan Jepang)

Tanggal 5 September 1945 ada intruksi dari pusat, bahwa supaya segera dilakukan pengambil alihan kekuasaan di kawedanan-kawedanan, serta pengibaran bendera Sang Merah Putih secara menyeluruh dengan penjagaan seperlunya terhadap sang Merah Putih tersebut. Sebagai hasil perundingan antara Mr. A. Abbas yang didampingi oleh beberapa pejabat kantor Karesidenan Lampung, antara lain St.Rahim Pasaman dengan pihak residen Lampung. Pihak pemerintah tentara Jepang yang bernama Kobayasi dengan didampingi oleh beberapa pejabat, maka kekuasaan atas pemerintahan Karesidenan Lampung diserahkan secara damai oleh Syucokan Lampung kepada Mr. A. Abbas Residen Lampung dari pemerintahan Indonesia.

Belanda melakukan serangan besar-besaran untuk menghancurkan Republik Indonesia yang dikenal dengan peristiwa Agresi Militer Belanda II, diumumkan pada tanggal 19 desember 1948. Peristiwa ini mengakibatkan pemimpin-pemimpin Indonesia seperti Soekarno, M. Hatta dan Syahrir ditangkap oleh Belanda. Kemudian untuk menjalankan pemerintahan, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang berpusat di Bukit Tinggi dan ditunjuk sebagai presiden sementara yaitu Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Pada masa ini atau dikenal juga masa revolusi phisik, Lampung Tengah merupakan daerah pertahanan di bawah Komado Front Utara yang berpusat di Kotabumi. Waktu itu beberapa kota strategis di Lampung Tengah selalu menjadi incaran Belanda karena mempunyai letak strategis baik dilihat dari segi politik, ekonomi maupun militer. Khusus di Kawedanan Metro dan kabupaten Lampung Tengah pada umumnya,

maka dari itu rakyat mempertahankan Kawedanan Metro dari incaran Belanda rakyat tidak ingin Kawedanan Metro jatuh ke tangan Belanda dan langkah yang diambil oleh para penyelenggara pemerintahan dan para pejuang bersenjata pada waktu perang kemerdekaan dari tahun 1945-1949, telah membuat sejarah yang sangat heroik. Lampung harus menghadapi kenyataan juga, pada saat terjadi Agresi Militer Belanda II, tentara Belanda juga mendarat di pelabuhan Panjang pada tanggal 1 Januari 1949 pagi hari sekitar pukul 06.00 WIB. Dalam menghadapi situasi yang genting ini, terselenggaralah pertemuan yang dilakukan oleh perkumpulan-perkumpulan organisasi baik partai, laskar-laskar rakyat atau badan-badan perjuangan lainnya.

Pertempuran di wilayah Metro terjadi di beberapa titik, bahkan meluas hingga hampir di seluruh wilayah Metro. Tanggal 7 Januari 1949 Dan Yon VI Kapten Harun Hadimarto memerintahkan Dan Ki I Lettu Supangat dengan seluruh peleton yang ada pada Ton III dibawah pimpinan Serma Dirun menuju arah Simbar Waringin di Bedeng 12 A. Ton lainnya arah Bedeng 20. Sesudah itu Dan Yon VI memerintahkan seluruh pasukan mundur dari Bedeng antara Bedeng 49/47 ke Kecamatan Batanghari. Komando Yon VI dan pemerintahan darurat RI berkedudukan di Kelurahan 39 Bumiharjo di rumah bapak Jais. Dan Yon Kapten Harun Hadimarto, bemarkas di gudang padi diantra Bedeng 4947. Pusat Komando di atas mungkin sudah diketahui oleh musuh, sehingga pusat komando harus pindah di Bedeng 41 A Batanghari bertempat di rumah bapak Lurah Joyo Sukarto. Pada tanggal 8 Januari 1949 subuh dilakukan pengecatan patroli Belanda pertama di Kampung Ganjar Agung, Bedeng 14 Trimurjo oleh pasukan CPM bersama-sama dengan laskar rakyat sebanyak 20 orang.

Setelah menunggu kedatangan patroli Belanda selama kurang lebih 4 jam, tiba-tiba truk pertama Belanda muncul dan berhenti persis di depan pasukan rakyat, sehingga terjadi tembak-menembak secara mendadak oleh laskar rakyat yang sempat membuat musuh agak panik. Hanya saja granat yang dilemparkan oleh para pemuda tersebut tidak satupun yang meledak sehingga rencana

serbuan oleh laskar rakyat tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Setelah pasukan bantuan Belanda tiba, baru laskar rakyat tersebut diperintahkan mundur ke arah bantul. Korban di pihak rakyat satu orang ialah bapak Kaum Achyar gugur. Sedang di pihak musuh menurut keterangan penduduk hanya mengalami luka-luka.

Tanggal 9 Januari 1949 pasukan Yon VI beserta staff nya bertempat di Kelurahan antara Bedeng 49/47 Kecamatan Batanghari. Dan Yon VI memerintahkan seluruh Ki menyerang Belanda ke Metro. Pada tanggal 25 Januari 1949 pasukan TNI dibawah pimpinan Lettu Sutrasno dan Letnan Surotomo mencegah Belanda di Pancur tetapi tidak berhasil sebab granat tidak ada yang meledak dan tidak ada korban. Pada tanggal 29 Januari 1949 pasukan TNI di bawah pimpinan Letnan Muda Surotomo mencegah Belanda di Batanghari Ogan, tetapi Belanda tidak lewat di situ. Pada bulan Januari 1949 juga pertempuran antara pasukan Letnan I Suratmin dengan tentara Belanda di Kayu Lampam Bandar Jaya (daerah Desa Gunung Sugih). Dalam pertempuran ini, telah dilakukan tindakan bumi hangus oleh pasukan pemuda terhadap kantor-kantor resmi pemerintah di Gunung Sugih.

Tindakan pembumi hangusan ini bertujuan agar kantor-kantor pemerintah tidak dimanfaatkan oleh pihak Belanda, hal serupa juga pernah dilakukan oleh para pemuda di Bandung (dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api). Tidak terdapat korban jiwa di pihak tentara rakyat dalam tembak menembak ini. Kompi I Letnan Supomo, yang sebelumnya ditugaskan menjadi lapangan udara Branti, setelah penyerbuan tentara Belanda 1 Januari 1949 di Tanjungkarang, mengundurkan diri dan mengambil kedudukan di perkebunan kelapa sawit Bekri untuk selanjutnya mempertahankan daerah sekitarnya. Berlangsung pertempuran antara pasukan Letnan I Supomo dengan pasukan tentara Belanda di daerah perkebunan Bekri.

Tetapi karena kekuatan persenjataan yang tidak seimbang, pasukan Letnan I Supomo terpaksa harus mengundurkan diri ke Kampung Haji Pemanggilan. Merupakan salah satu usaha atau kegiatan oleh komando

front utara, di perkebunan karet nakau (Kotabumi), telah diatur adanya sebuah radio penerima. Untuk menjaga dan melayani radio tersebut, telah ditugaskan seorang perwira perhubungan, yang secara terus menerus mengikuti semua perkabaran atau berita baik dari dalam dan luar negeri yang menyangkut semua masalah perjuangan kemerdekaan, ataupun usaha pejuang-pejuang RI secara diplomasi di luar negeri.

Dengan kegiatan dan usaha-usaha ini, telah dapat diketahui lewat siaran radio luar negeri, tentang adanya suatu prakarsa mengenai Konferensi Asia oleh Perdana Menteri U Nu dari Burma, yang akan diadakan tanggal 20 – 30 Januari 1949 di New Delhi, untuk membicarakan agresi Belanda terhadap Indonesia, dengan maksud supaya Belanda menghentikan agresinya dan menarik tentaranya dari Indonesia. Induk Yon VI yang berpusat di Bedeng ( antara Bedeng 49/47) Kecamatan Batanghari, jam 23.30 WIB diserang Belanda pada tanggal 17 Februari 1949. Anggota pasukan kita banyak yang gugur. Anggota TNI yang gugur ditembak Belanda. Pada tanggal 18 Februari 1949 markas CPM yang bertempat di kelurahan 43 Kecamatan Batanghari Pimpinan Letnan Muda CPM Yahya Murad diserang oleh pasukan Belanda.

Korban di pihak rakyat tidak ada, karena gerakan mereka sudah diketahui beberapa hari sebelumnya oleh rakyat. Pada pertempuran tanggal 5 Februari 1949 yang terjadi di Bedeng 48, gugur Sersan Subandi dan Kopral Mardi dari CPM.

Tanggal 20 Februari 1949 keadaan pasukan pemuda berubah menjadi Sub Sektor 113 Lampung Tengah, yang berada di Gunung Sugih Kecil Kecamatan Jabung. Sebagai wakil Dan Yon atau Dan Sektor 113 adalah Letda Sutrasno. Sementara Dan Yon atau Dan Sektor 113 berupaya mencari tempat untuk menempatkan pasukan yang lebih aman, Dan Yon Harun Hadimarto gugur beserta anak buahnya berjumlah 15 orang di daerah akung, Kecamatan Menggala. Pasukan dari Sektor 113 terdiri dari satu pasukan di Kecamatan Jabung yang dipimpin oleh Serma Vandrig Makmun, satu pasukan di Labuhan Maringgai dipimpin oleh Letnan Muda Arifin RI, dan satu pasukan di Kecamatan

Purbolinggo dipimpin oleh Letnan Muda Yahya Murad.

Di masa perang kemerdekaan (revolusi fisik) melawan penjajah Belanda tahun 1949, rakyat Kecamatan Jabung Lampung Tengah juga berpartisipasi aktif membantu para penjuang (oknum-oknum pemerintah sipil dan ABRI) dalam rangka membela dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Diantara yang telah banyak berjasa itu antara lain di Desa Bungkok – Jabung bernama : Haji Abdul Majid dan Puteranya Moh Ali Gelar Dalom Sampurnajaya, Minak Ngegeduh, dan Haji Umar. Mereka telah memberikan banyak bantuan dan pinjaman apapun yang diperlukan kepada pejabat Sipil dan ABRI yang berwenang di Kecamatan Jabung dan Kawedanan Sukdana. Pada tanggal 15 Februari 1949 kurang lebih jam 17.00 sore Belanda masuk dari arah Metro menuju Markas Laskar Bedeng 43, kebetulan markas tersebut kosong, sehingga Belanda menggeledah rumah-rumah rakyat. Yang menjadi sasaran adalah rakyat sehingga terjadi korban 4 orang tewas. Di Lampung terbentuklah berbagai organisasi perjuangan, yang gerakan-gerakannya turut membantu menegakan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sebagai mitra Karesidenan Lampung. Tanggal 5 Oktober 1954 pemerintah pusat membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan maksud untuk memperkuat perasaan keamanan umum. Pada bulan November 1945, Dr. A. K. Gani Residen Palembang diangkat oleh pemerintah pusat menjadi kordinator Tentara Keamanan Rakyat Sumatera.

Bulan Desember 1945 para bekas perwira *Gyugun* Lampung yang memimpin PKR, Pelopor dan organisasi kelaskaran mengadakan musyawarah untuk membentuk Resimen TKR di Lampung. Di dalam musyawarahnya tersebut terpilih Iwan Supardi sebagai komandan Resimen dan M. Sukardi Hamdani sebagai kepala Markas Umum Resimen III divisi Lampung.

Dalam perkembangan selanjutnya bulan Februari tahun 1946 tentara Jepang yang menduduki daerah Lampung telah selesai seluruhnya meninggalkan Lampung menuju Palembang. Namun demikian sejak negara RI

diproklamasikan, sistem pemerintahan pada zaman Jepang masih diteruskan. Dengan Surat Keputusan Gubernur sementara (Medan) tanggal 17 Mei 1946 No.113, Karesidenan Lampung dibagi menjadi 33 kabupaten, 11 kewedanan. Setiap kewedanan dibagi atas beberapa kecamatan dan kecamatan dibagi lagi menjadi beberapa marga.

Pada masa itu kota Bandar Lampung masih berstatus kota kecil Tanjungkarang-Telukbetung, yang merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Kota kecil ini mempunyai Anggota DPR kota sebanyak 11 orang yang diketuai oleh Bupati Lampung Selatan, namun dengan PP.39/1950 DPR kota ini kemudian dibubarkan.

Di zaman Jepang sebagai Bun-si/walikota pertama kota kecil Tanjungkarang-Teluk Betung ini adalah R.A.Basyid, yang nantinya ditahun 1949 menjadi Wakil Residen Lampung. Berdasarkan UU Darurat No.5 tahun 1955 kota kecil TanjungKarang-Telukbetung berubah menjadi kota besar sebagai walikotanya adalah A.Nurdin Jayasaputra. Selanjutnya berdasarkan UU no.23 tahun 1959 kota besar ini menjadi kota praja. Pada tanggal 10 September 1946 ada rapat raksasa di Lapangan Enggal yang diadakan oleh panitia perbaikan masyarakat, yang tokoh penggeraknya adalah Abdullah Sani, Abdul Kohar dan sebagai pembicaranya adalah Zainal Abidin. Panitia ini mendesak agar supaya residen Mr.Abbas turun dari jabatannya dan digantikan oleh Dr.Badril Munir sebagai residen Lampung dan wakilnya Ismail. Oleh pemerintah pusat disetujui Dr.Badril Munir menjadi residen dan untuk wakilnya R.M Rukadi Wiryoharjo sebagai wakil Residen Lampung dan pada 29 November 1947 Dr.Badril Munir meletakkan jabatannya dan digantikan oleh R.M.Rukadi Wiryoharjo sebagai Residen Lampung dan R.A.Basyid sebagai wakilnya.

Sebelum peristiwa Clash I tanggal 21 Juli 1947 oleh Belanda, Provinsi Sumatera dibagi menjadi 3 sub-provinsi, diantaranya sub-provinsi Sumatera Selatan dimana Lampung masuk di dalamnya sebagai karesidenen. Maka demikian sebelum Clash I oleh Belanda Lampung berubah status menjadi karesidenan yang merupakan sub-provinsi Sumatera Selatan bukan Provinsi Sumatera lagi.

Karesidenan Lampung terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, dan mempunyai luas wilayah 35.3765 km<sup>2</sup>. Secara geografis Karesidenan Lampung mempunyai batas wilayah sebelah Selatan dibatasi oleh Selat Sunda, sebelah Utara dibatasi Sumatera Selatan, sebelah Barat dibatasi Samudera Hindia, dan bagian Utara berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Di pantai selatannya menjorok tiga tanjung dengan dua teluk yang mengitarinya. Ketika tanjung tersebut dari timur kebarat ialah Tanjung Tua, Tanjung Rata dan Tanjung Cina. Dua teluk yang mengintarnya masing-masing, Teluk Lampung dan Teluk Semangka (Kuntoyo, Sutrisno, 1978-1979:1).

Letak Karesidenan Lampung cukup strategis apabila dikaitkan dengan aktivitas ekonomi di pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera sebab Karesidenan Lampung merupakan pintu gerbang lalu lintas antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Berdasarkan letak astronominya kedudukan Karesidenan Lampung berada di sebelah selatan garis khatulistiwa oleh sebab itu Karesidenan Lampung memiliki iklim tropis dengan curah hujan sepanjang tahun serta kelembapan yang cukup tinggi.

Penduduk Provinsi Lampung adalah heterogen, sesuai dengan lambang daerah Lampung "Sai Bumi Ruwa Jurai" yang berarti suatu daerah yang didiami dua unsur masyarakat yang berdomisili di daerah Lampung. Orang lampung atau penduduk asli Lampung secara garis besar terbagi menjadi enam kelompok masyarakat adat, yaitu Lampung Abung, Lampung Tulang Bawang, Lampung Pubian, Lampung Sungkai, Lampung Way Kanan, dan Lampung Saibatin. Awal abad 19 pemerintah Belanda memasukkan tanaman kopi ke Lampung. Sistem pelaksanaannya sudah dijalankan di Lampung pada pertengahan abad ke 19, menghasilkan munculnya perkebunan-perkebunan kopi yang luas seperti disekitar Tanjungkarang, Telukbetung, Talang Padang, Kota Agung dan Padang Ratu.

Pada periode ini, Rakyat ikut menanam kopi, sehingga kelak meluas perkebunan kopi rakyat, suatu bentuk suatu sumber kehidupan rakyat yang baru. Sebelum itu memang mata pencaharian pokok masyarakat

Lampung adaalah pertanian. Mereka berladang dengan cara berpindah-pindah dan membuka perkebunan lada sejak abad ke 12 terutama di daerah Lampung Utara dan Tengah. Penduduk pendatang yang paling banyak di daerah Lampung adalah suku Jawa. Mereka memang didatangkan ke Lampung oleh pemerintah Belanda melalui program kolonisasi. Kolonisasi pertama tahun 1905 berasal dari Desa Bagelan Jawa Tengah yang ditempatkan di Desa Gedong Tataan Lampung Selatan. Kehadiran suku Jawa di Gedung Tataan ini diterima oleh suku Lampung Marga Wai Semah. Kehidupan kedua suku antara Jawa dan Lampung hidup berdampingan saling menghidupi dan menguntungkan. Jika suku Lampung yang berprofesi sebagai petani lahan kering dengan jenis tanaman kerasnya, maka suku Jawa asli sebagai petani lahan basah di sawah. Harmonis kedua suku tersebut terus berlanjut sampai berbesanan, banyak anak-anak mereka yang saling mencintai dan membangun rumah tangga yang lebih sejahtera

Menjelang tahun 1949, sekitar bulan-bulan November dan Desember 1948, keadaan kota Tanjung Karang-Teluk Betung relatif tenang dan aman, dalam arti tidak terdengar adanya tembakan, letusan senjata dan ledakan-ledakan seperti suasana dalam keadaan perang. Hal ini disebabkan oleh karena pada waktu itu adalah di dalam suasana gencatan senjata akibat adanya Perjanjian Renville, tetapi sebenarnya tidaklah dapat dikatakan bahwa hasil Perjanjian Renville memuaskan bagi kita, sehingga dapat menjamin suasana ketenangan tadi.

Dikalangan politisi kita di negara Republik Indonesia, Perjanjian Renville menimbulkan pertikaian anatara golongan yang pro dan kontra, sehingga mengakibatkan adanya krisis kabinet. Dikalangan militer, perjanjian Renville dianggap sangat merugikan kita, ditinjau dari segi posisi strategi dan kedudukan kita. Akibatnya kita banyak ditekan oleh Belanda, misalnya saja dalam mentaati garis Van Mook yang khayal, tetapi harus dipatuhi.

Dari segi sosial ekonomi, perjanjian Renville juga sangat merugikan, karena daerah-darah potensial dan surplus dikuasai

oleh belanda dan kita tinggal menguasai daerah-daerah yang minus atau tidak mendatangkan kesejahteraan bagi penduduknya. Ditambah lagi blokade yang dilakukan Belanda di dalam usahanya mematahkan ekonomi kita yang pada akhirnya bertujuan mematikan Negara Republik Indonesia. Keadaan ekonomi, politik, sosial dan militer yang serba sulit itu ditambah lagi dengan hubungan yang kurang serasi antara kaum politisi di dalam pemerintahan dengan pihak militer, tetapi sebagai militer yang berdisiplin tinggi, maka pihak militer tetap taat terhadap keputusan politik negara. Reorganisasi dan rasionalisasi yang sering disebut re dan ra serta penurunan pangkat satu tingkat dikalangan militer Sumatera Selatan dan Lampung khususnya dapat dilaksanakan dengan baik berkat disiplin dan pengertian yang mendalam terhadap kesatuan korps.

Tragedi nasional berupa pemberontakan PKI di Madiun sangat dirasakan sebagai tusukan dari belakang terhadap negara kita. Justru disaat-saat kita sedang konfrontasi menghadapi agresor Belanda, PKI malah berkhianat. Untunglah bahwa di Lampung gema pemberontakan itu tidak menggiyahkan sendi-sendi sosial politik dan rakyat pada umumnya. Di dalam suasana gencatan senjata yang serba tidak menentu itu digunakanlah oleh TNI di Sumatra bagian selatan dan termasuk Lampung untuk mengadakan konsolidasi kekuatan. Hijrah dan *wingate* yang dilakukan oleh pasukan STP Garuda Merah menempuh jarak 1000 km dapat diselesaikan dengan baik di bawah pimpinan Kapten Alamsyah yang terdiri dari pasukan Letnan Asnawi Mangkualam, Letnan Nuh Macan dan Letnan Riakudu memasuki Lampung untuk seterusnya akan meneruskan perjalanan ke Tebittinggi. Pada waktu itu daerah-daerah di Sumatera Bagian Selatan yang masih potensial membantu logistik dan persenjataan TNI adalah Lampung, Bengkulu dan Jambi.

Dari Lampung dan Jambi dapat melakukan barter menerobos blokde ekonomi Belanda ke Singapura, dari Singapura dapat dimasukkan bahan pakaian berup blacu, sepatu, rokok dan keperluan lainnya yang dapat membantu logistik TNI bukan saja di

Lampung tetapi juga di Sumatera bagian selatan yang lain bahkan sampai di Banten. Selain usaha mendapatkan senjata secara demikian, di Lampung juga didirikan pabrik senjata dan percetakan uang di Gunung Meraksa.

Pabrik senjata itu tergolong yang paling besar di Sumatra bagian selatan, yang memproduksi selain granat tangan, ranjau darat, meriam kecepek, pistol, senapan dan mortir yang terbuat dari tiang telepon, juga peluru dan mesin Pimpinan pabrik adalah Kapten Margono, ada juga seorang keturunan Belanda bernama Van der Linden yang biasa dipanggil Pak Lindu, kemudian berganti nama Indonesia Abdurahman tinggal di Sukoharjo Pak Lindu adalah ahli di dalam revisi peluru. Di dalam gencatan senjata suasananya ibarat api sekam, artinya sewaktu-waktu dapat menyala kembali. Belanda yang sangat licik menggunakan gencatan senjata untuk memperkuat diri dalam usaha memusnahkan negara Republik Indonesia. Tidak ada niat baik di dalam diplomasi dan perundingan. Selalu dicari dalih-dalih yang tidak masuk akal untuk melanggar pasal-pasal persetujuan yang telah disepakati bersama. Selain pelanggaran militer di daerah status *quo* juga dilaksanakan politik *divide et impera* dengan membentuk negara-negara boneka. Tujuan membentuk negara boneka adalah agar RI semakin terjepit dan Belanda dengan mudah memaksakan kehendaknya alias dapat mendikte RI sesuai dengan rencana mereka. Belanda sengaja menolak penyelesaian pelanggaran-pelanggaran perjanjian dimeja perundingan, dengan perhitungan RI sudah semakin lemah dan sudah tidak berdaya menolak tuntutan Belanda.

Selain melaksanakan konsolidasi kekuatan, maka sub territorial Lampung di bawah Letkol Syamaun Gaharu berusaha mendapatkan senjata dari Divisi Siliwangi di Jawa Tengah, yang baru saja menumpas dan melucuti senjata PKI dan kesatuan yang membantunya. Untuk keperluan itu dimanfaatkan pesawat yang datang mengangkut perwira-perwira muda tamatan Akademi Militer Jogja yang mendarat di Lampung. Dengan perhitungan bahwa Belanda akan memasuki Lampung dari Utara maka diputuskan di dalam rapat komando

bahwa batalyon mobil yang persenjataannya paling lengkap di kiri ke utara, sedang di Selatan pasukan Kapten Ismail Husin dengan persenjataan serba minim. Di panjang dipertahankan oleh pasukan ALRI pangkalan IA Lampung di bawah Kapten Laut C. Souhoka dan Komandan Armada Lettu Hotma Harahap.

Di Lampung Tengah pasukan Kapten Harun Hadimarto juga sangat minim persenjataannya. Maka rencana yang telah disusun oleh Sub Territorial Lampung adalah membumi hangus bangunan-bangunan vital yang di Tanjung Karang-Teluk Betung jika Belanda mendarat. Untuk tugas itu telah ditetapkan pasukan ALRI pangkalan IA Lampung bersama pasukan pimpinan Letda Kgs. Zen dan Letda Ismil Latif untuk menyiapkan bahan-bahan untuk bumi hangus jika waktunya telah tiba. Selain itu juga perlawanan dengan perang gerilya karena persenjataan sangat minim.

Telah dikumpulkan bahan-bahan karet dan bensin digunakan untuk membumi hanguskan gedung-gedung vital pemerintah dan lain-lainnya antara lain di Pelabuhan Panjang, rumah residen di Teluk Betung, kantor Residen Tanjung Karang, Hotel Juliana, asrama-asrama dan stasiun-stasiun.

Di gedung-gedung yang akan dibumi hanguskan telah dipersiapkan dengan meletakkan/menaruh barang-barang yang mudah terbakar. Komando Sub Teritorial Lampung juga telah merencanakan pembagian operasi jika terjadi penyerbuan Belanda terhadap kota Tanjung Karang/Teluk Betung. Berdasarkan strategi militer dan perjuangan yang telah digariskan oleh Panglima besar TNI Jenderal Sudirman, maka taktik menghadapi Belanda tidak akan mengadakan perlawanan terbuka, melainkan dengan taktik gerilya (*hit and run*) dan memutus jalur-jalur komunikasi lawan serta memecah-mecah kekuatan lawan atas kelompok-kelompok kecil sehingga mudah diserang dan dihancurkan. Di samping itu kerjasama dan bahu-membahu dengan kekuatan perjuangan lain harus dibina dan dijaga kekompakannya terutama yang menyangkut segi logistik. Dalam siasat perang gerilya dukungan rakyat setempat sangat menentukan, maka perlu dibina dan

dipererat kerjasama antara tentara, laskar dan rakyat.

Di Lampung agresi militer kedua baru dimulai tanggal 1 Januari 1949, Belanda masuk Teluk Lampung melewati Kalianda menuju Pelabuhan Panjang. Kira-kira Pukul 05.00 pagi, kapal perang Belanda mulai menembaki Pelabuhan Panjang. Tetapi karena perlawanan dari pihak tentara kita di Panjang, baru sekitar pukul 06.00 pagi mereka dapat mendarat di Pantai luar Pelabuhan Panjang dan di sekitar Gunung Kunyit Telukbetung. Ibukota di kuasai pada hari itu juga dan maka pemerintah karesidenan dan stafnya menyingkir ke luar kota. Komandan Sub-Teritorial Lampung, Letkol Syamaun Gaharu, dengan anggota-anggotanya beserta beberapa pejabat pemerintahan sipil sudah di Gedong Tataan pada 1 Januari, sedang rombongan keluarga militer dan sipil yang mengungsi sudah berada di Pringsewu.

Dalam waktu itu komandaan front utara, dengan bataliyon mobilnya yang di pimpin oleh Mayor Nurdin pada sorenya sudah berada di Kotabumi.

Malam harinya mengadakan rapat dengan dengan Bupati Lampung Utara dan tokoh masyarakat dan pimpinan partai untuk membentuk pemerintahan darurat Karesidenan Lampung.

Karena diketahui bahwa Residen dan wakil Residen tidak dapat keluar dari Tanjung Karang maka rapat memutuskan mengangkat Bupati Lampung Utara Akhmad Akuan menjadi residen darurat dan diputuskan pula membuat untuk mencetak uang darurat, yang ditandatangani oleh Bupati Lampung Utara Akhmad Akuan, yang akan dipergunakan untuk menanggulangi kebutuhan belanja serta makanan bataliyon mobil selama berada di Lampung Utara.

Tanggal 5 Januari 1949 Wakil Residen R.A. Basyid telah keluar kota Tanjung Karang maka berdasarkan hasil musyawarah antara komando Staf Sub-Teritorial, para pimpinan partai, K.H. Gholib dari pesantren Pringsewu dan para pejabat Karesidenan Lampung yang berada di Pringsewu maka mengangkat Mr. Gele Harun sebagai Residen menggantikan Residen Rukadi yang masih berada di Kota Tanjung Karang dan kemudian R.A. Basyid sebagai Wakil Residen.

Pada tanggal 7 Januari 1949 berhubung telah dibentuk pemerintahan darurat di Pringsewu maka pemerintahan darurat yang ada di Lampung Utara di bubarkan dan Akhmad Akuan kembali menjabat sebagai Bupati Lampung Utara pemerintahan darurat dan staf Sub teritorial Lampung kemudian pindah ke Talang Padang terus ke Gunung Maraksa hingga ke Way Tenong. Baru pada menjelang penyerahan Kota Bumi dari Belanda kepada Pemerintahan RI, mereka pindah ke Bukit Kemuning.

Pada tanggal 15 Januari 1949 Gedongtataan diduduki oleh Belanda, maka pasukan ALRI bersama dengan pasukan-pasukan lain menghindari ke desa Way Lingti, di Kaki Gunung Sukma Ilang. Sementara itu kegiatan pasukan ALRI bekerja sama dengan rakyat adalah membuat rintangan-rintangan jalan dan menghancurkan jembatan antara kampung Negeri Sakti sampai Km 21.

Pada suatu kesempatan, pasukan ALRI sebanyak 2 regu berhasil menghadang konvoi kendaraan militer Belanda yang datang dari Gedong Tataan menuju Tanjung Karang. Di dalam kontak senjata singkat itu (dan ini untuk kedua kalinya) pasukan ALRI berhasil menewaskan 3 orang tentara Belanda, termasuk diantaranya seorang yang berpangkat opsir/perwira. Setelah ada kontrak dengan koordinator militer front selatan, maka untuk kepentingan taktis operasional, markas ALRI dipimpin kesalah satu Desa di Way lima.

Disana secara bergilir dengan pasukan CPM yang dipimpin oleh Letnan II Alimuddin bertugas mempertahankan pos terdepan Way Semah yang jaraknya hanya  $\pm 1,5$  km dari pos Belanda di Gedong Tataan. Pada waktu kedudukan pasukan ALRI ada di Way Semaya, Belanda pernah menyerang pos ALRI tersebut dan ini adalah untuk ketiga kalinya pasukan ALRI menghadapi Belanda.

Dalam usaha mempertahankan pos Way Semah tersebut pasukan ALRI dapat bertahan sampai  $\pm 2$  jam, karena keadaan medan yang sangat menguntungkan. Tetapi setelah dihujani dengan tembakan-tembakan mortir maka pasukan ALRI mundur dan dalam pertempuran itu gugur 2 orang pahlawan kita: Kopral Muhidin dan Kelasi Sutaji. Pada bulan april 1949 Kapten C. Souhoka dengan seorang

perwira dan 3 orang bintara dari ALRI diperbantukan untuk memperkuat staf komando Gerilya daerah III di Kedondong yang dipimpin oleh Kapten Ismail Husin. Maka untuk sementara pasukan Induk ALRI didalam operasinya dipimpin oleh Kapten K.L. Tobing.

Menurut keputusan rapat komando tanggal 31 Desember 1948 di rumah Letnan Warkoskusmo di Gunung Terang telah diputuskan strategi: "Perang gerilya dan bumi hangus terhadap bangunan vital yang dapat digunakan oleh musuh". Pada tanggal 1 Januari 1949 Kapten Margono lapor kepada kepala staf STL Letkol Iwan Supardi melalui Suranto, bahwa pabrik senjata Gunung meraksa siap di bumi hangus, karena *sparepart* yang penting telah didiamkan. Jadi perintah langsung dari Kastaf STL tidak ada dan menurut strategi, pembakaran sudah benar berdasarkan surat ketetapan komando STL No. 527/B tanggal 15 Desember 1948.

Mengenai pabrik senjata dan pencetakan uang tersebut kemudian diperintahkan produksi lagi, hanya dikerjakan dengan tangan/manual, karena mesin-mesin tidak dapat segera dipakai lagi. Pada tanggal 5 Januari 1949 Wakil Residen RA. Basyid keluar dari Tanjungkarang dan berada di Pringsewu, yaitu tempat kedudukan para tokoh masyarakat dan para pemimpin pemerintahan yang sudah keluar dari Tanjungkarang, kemudian pada tanggal 5 Januari 1949 itu juga diadakan musyawarah antara komandan Sub Teritorial Lampung, Letkol Syamaun Gaharu beserta staf Mayor N.S Effendi dan para tokoh masyarakat dan partai antara lain: Hi. Abdul Halim dari PSII, Hi. Yasin dari Masyumi dan Kyai Gholib di Pendopo Pringsewu.

Musyawah tersebut menjadikan keputusan pertimbangan bahwa Hassiden Rukadi sampai pada saat itu tidak keluar dari Tanjungkarang berarti tetep di daerah penduduk Belanda, maka harus segera diambil tindakan untuk membentuk pemerintahan darurat Karesidenan Lampung. Residen Rukadi sudah berusaha keluar dari Kota Tanjungkarang pada tanggal 1 Januari 1949. Tetapi Mobilnya rusak ditembak pesawat Belanda, sehingga kemudian Residen Rukadi menetapkan di Rumah Basyir Abdat

di Telukbetung. Dengan diduduknya kota Tanjung Karang-Teluk Betung oleh Belanda tidak berarti bahwa kita telah kalah perang. Belanda boleh bermimpi dengan lagu lamanya, "Politik pastifikasi dengan *Korte Verklaring*" nya tahun 1911, tetapi keadaan kita dewasa ini sudah berbeda dengan zaman itu. Belanda tidak lagi boleh berfikir bahwa jika suatu daerah telah dikuasai pimpinannya, berarti daerah itu sudah menyerah kepadanya, karena rakyat patuh atau tunduk kepada pimpinannya tanpa *reserve*.

Setelah diadakan konsolidasi, maka pasukan-pasukan yang berada di front selatan mulai melaksanakan aktivitas gerilya. Selain mempertahankan setiap jengkal tanah air juga dilaksanakan serangan-serangan terhadap kedudukan Belanda. Serangan-serangan itu selain memancing agar Belanda keluar dari sarangnya, juga sekedar mengingatkan agar Belanda sadar bahwa mereka tidak bisa enak-enak makan dan tidur di bumi yang mereka jajah dan mereka duduki. Pasukan polisi militer di bawah pimpinan Lettul Suratno bertempur melawan Belanda di Kaliawi dan Langkapura dan usahanya untuk membuktikan bahwa tentara dan lasykar kita masih sanggup mengusik kedudukan Belanda. Pasukan kepolisian di bawah pimpinan Inspektur polisi Slamet dan TNI di bawah pimpinan Letnan Muda Supangat mengalami tembak-menembak dengan pasukan Belanda yang sedang berpatroli di Pasir Gintung dan pasukan Vadring Santibi berbaku tembak dengan pasukan Belanda di Natar.

Pasukan Letnan II Asnawi Mangku Alam, Riyakudu dan Nuh Macan yang merupakan pasukan Garuda Merah di bawah Kapten Alamsyah yang berada di Tanjungkatang ketika Belanda menduduki Tanjung Karang-Teluk Betung pada tanggal 1 Januari 1949, kemudian dari Kedaton mundur di Kemiling, dari markas kedudukannya itu pasukannya pernah menyerang bui Lebakbudi dan di markas Kemiling terjadi tembak menembak dengan pasukan Belanda yang datang dari Telukbetung menuju Kemiling. Kemudian karena markasnya dianggap kurang aman terhadap serangan Belanda dari belakang, maka pasukannya dipindahkan di Gadingrejo.

Mengenai pasukan ALRI pangkalan I A Lampung yang semula bertahan di Pelabuhan

Panjang, karena pertemuan yang tidak seimbang, yaitu dengan senjata seadanya, sedangkan pihak Belanda menggunakan senapan mesin, meriam dan mortir, maka akhirnya pasukan ALRI juga mundur ke arah Kemiling. Pasukan ALRI semula berhubungan langsung dengan markas besar ALRI di Yogyakarta, yaitu sejak Maret 1947. Tetapi kemudian karena hubungan dengan markas besar ALRI di Yogyakarta terputus dan usaha menghubungi perwakilan ALRI di Bukit Tinggi juga tidak berhasil, lalu pimpinan militer Lampung mengambil kebijaksanaan, ALRI pangkalan IA Lampung secara taktis operatif diletakkan di bawah komando Brigade Garuda Hitam yang dipimpin oleh Letkol Syamaun Gaharu, yaitu sejak bulan September 1948.

Pada waktu kapal Belanda menyerang Pelabuhan Panjang pada tanggal 1 Januari 1949 maka seksi pasukan Armada dan Korp Marinir di bawah pimpinan Lettu Hotma Harahap telah bersiap-siap menghadapi musuh.

Berita tentang datangnya kapal perang Belanda telah diketahui dari pos ALRI di Kalianda pada tanggal 31 Desember 1949 pada Pukul 19.00 pada tanggal 1 Januari 1949 kira-kira Pukul 05.00 kapal perang Belanda mendekati Pelabuhan Panjang, tetapi kemudian disambut dengan tembakan-tembakan oleh pasukan ALRI, sehingga tidak jadi mendarat.

Tetapi kapal Belanda melepaskan tembakan mitralyur, meriam dan mortir. Pertempuran di laut tersebut, merupakan pengalaman pertama kali pasukan ALRI karena keadaan persenjataan yang sangat tidak seimbang, maka pasukan ALRI diperintahkan mundur dan sambil melakukan bumi hangus. Selanjutnya diperintahkan untuk berkumpul di Km 21 Gedongtataan, yang ditentukan sebagai markas darurat pasukan ALRI.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di Lampung pada tahun 1949 terjadi suatu peristiwa yang membuat pemerintah dan rakyatnya berjuang untuk mempertahankan wilayah Lampung dari serangan Belanda.

Kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan adalah adanya upaya penyelamatan dari rakyat dan Pemerintahan Lampung yang saat itu diserang Belanda yaitu dengan upaya penyelamatan dibidang politik yaitu dengan membuat pemerintahan darurat yang berpindah-pindah sebagai usaha penyelamatan ibukota yang ingin diduduki dan direbut oleh Belanda dan adanya upaya penyelamatan dari rakyat dan Pemerintahan Lampung yang saat itu diserang Belanda yaitu dengan upaya penyelamatan dibidang militer yaitu dengan serangan gerilya yang didominasi penyerangan oleh ALRI dan dibantu oleh rakyat dan pemerintah daerah Lampung untuk melawan Belanda.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktis*. Bina Aksara: Bandung.
- Bayu Surianingrat. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Penelitian Kualitatif*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Dewan Harian Daerah Angkatan 45. 1994. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Lampung buku I*. CV. Mataram: Bandar Lampung.
- Dewan Harian Daerah Angkatan 45. 1994. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Lampung buku II*. CV. Mataram: Bandar Lampung.
- Dewan Harian Daerah Angkatan 45. 1994. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Lampung buku III*. CV. Mataram: Bandar Lampung.
- Depdikbud. 1991. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Cipta Adi Pustaka: Jakarta.
- H. Nasution. 1997. *Disekitar perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 3. (Diplomasi sambil bertempur)*. PT Angkasa: Bandung.
- Imron, Ali, Dkk. 1995. *Sejarah Pembentukan Provinsi Lampung*. CV. Mataram. Bandar Lampung.

- Koentjaraningrat. 1977. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Inti Indayu: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia*. Depdikbud: Jakarta.
- Nazir, Muhammad. 1993. *Metode Penelitian Masyarakat. Prosedur dan Strategi*. Angkasa : Bandung. Halaman : 211.
- S. Pamuji. 1992. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Bumi Aksara: Jakarta.
- The Liang Gie. 1993. *Pertumbuhan Pemerintahan daerah di Negara Republik Indonesia Jilid I*. Liberty: Yogyakarta.
- Zed, Mustika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Wikipedia Indonesia, diakses tanggal 10 Desember 2012 Pukul 22.00.